

TAJUK RENCANA

Melangkah Kembali dengan Dwifungsi TNI?

WAKIL rakyat adalah mereka yang dipilih langsung oleh rakyat. Mereka mengemban amanat rakyat sebagai penyambung lidah rakyat. Namun ternyata suara wakil rakyat dan suara rakyat tidak selalu seirama. Tidak jarang bertolak belakang. Di tengah gelombang aksi rakyat — terutama dari kalangan kampus — yang berteriak menolak, Ketua DPR telah mengemukakan palu, tanda mengesahkan RUU TNI menjadi UU TNI.

Meski wajar undang-undang yang sudah berjalan 2 periode direvisi, namun keputusan besar tersebut tidak dapat diselesaikan terburu-buru. Jas Merah, *jangan melupakan sejarah*, kata Bung Karno. Karena menurut Rektor UII Fathul Wahid, kita memiliki sejarah kelas sebelum reformasi, kala Dwifungsi ABRI masih berjalan dan ada banyak hal yang harus disesali serta tidak ingin itu terulang kembali. Mulai terancamnya demokrasi, melemahnya supremasi sipil, potensi pelanggaran HAM dan represi militer. Sehingga masyarakat sipil menjadi ketakutan menyampaikan aspirasi. Meski kilah hanya 3 pasal yakni : pasal 3, pasal 47 dan pasal 53 yang direvisi memang terdengar. Namun perubahan ditiga pasal inilah pengulangan paradigma dengan cara baru. Karena yang diubah itu sangat krusial bagi supremasi sipil.

Tidak ingin seperti keledai yang terperosok dua kali dalam lubang yang sama, kampus yang selama ini senyap mulai menggeliat. Dimotori UGM, mereka melantang gelombang aksi menentang pengesahan RUU TNI menjadi UU. Lantangan yang mengajak agar kampus lain benar-benar memainkan peran sebagai rumah intelektual menjaga moral publik pun digaungkan. Geliat mulai disambut di banyak tempat dan suara pun menggema, meski belum membahana karena puasa dan mendekati libur lebaran.

Miris! Situasi puasa dan masa libur kuliah, membuat lantangan intelektual kampus dibiarkan berlalu. Akhir pekan lalu, RUU TNI disahkan DPR menjadi UU. Pengesahan di masa kritis ini tampaknya benar-benar diman-

faatkan wakil rakyat yang merasa nyaman, sekalipun menelikung suara pendukung dalam pemilu. Masa kritis yang sudah diingatkan para orator dalam AksiUII pekan lalu ; ketika rakyat sedang disibukkan proses libur bersama dan mudik lebaran, mahasiswa mulai kembali ke daerah atau sedang menikmati libur lebaran. Palu ketua diketukkan, tanpa ada dinamika sidang paripurna.

Namun sekali layar terkembang, pantang surut. Sadar tidak ingin menjadi keledai yang harus terperosok duakali dalam lubang yang sama, aksi berlanjut. Meski sudah disahkan DPR, sivitas akademika UMY berseru. Membacakan pernyataan sikap, Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Prof Dr Zuly Qodir menentun agar Presiden Prabowo Subianto tidak menandatangani undang-undang tersebut. Namun harus serta menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) mengembalikan TNI pada kedudukan semula. (KR, 23/3).

Akankah itu dapat berjalan? *Wallahu 'alam*. Bukankah RUU TNI juga dibahas kembali karena surat Presiden kepada DPR, Februari lalu yang menyatakan persetujuan bahkan menunjuk wakil pemerintah untuk membahasnya. Sementara di Indonesia sistem perundang-undangannya mengenal satu jenis yakni peraturan yang disusun DPR dengan persetujuan dan pengesahan dari presiden lewat tandatangannya. Namun dalam pasal 20 ayat (5) UUD yang telah diamandemen disebutkan : *dalam hal RUU yang sudah disetujui bersama itu tidak disahkan oleh presiden dalam waktu 30 hari semenjak RUU tersebut disetujui, RUU tersebut sah menjadi UU*.

Ditandatangani atau tidak, RUU TNI tetap akan menjadi UU TNI. Jika itu terjadi dan semua di-

am, haruskah kita melangkah kembali dengan Dwifungsi TNI? Harapan kita kemudian tinggal pada bergandengan kuatnya masyarakat sipil, kampus dan elemen lain, untuk melakukan *judicial review* (JR) di Mahkamah Konstitusi (MK). □-f

Super Holding BUMN



Yolanda Simbolon

BARU-BARU saja muncul suatu badan pengelola investasi yang bernama Daya Anagata Nusantara (Danantara). Gagasan mengenai super holding ini mencuat dengan tujuan agar kontribusi perusahaan kepada negara meningkat.

BUMN kepada negara meningkat. Pasalnya, Danantara akan mengoptimalkan aset negara dengan cara mengelola dividen dari perusahaan-perusahaan BUMN. Dividen tersebut lalu akan diinvestasikan ke beberapa sektor seperti industri manufaktur, energi baru terbarukan dan proyek strategis lainnya. Secara paralel, pembangunan negara juga diharapkan akan meningkat.

Meski begitu, Badan investasi yang digadang-gadang bermanfaat bagi pembangunan nasional ini ternyata juga menyimpan risiko. Danantara didirikan dengan nominal dana yang sangat fantastis, sekitar Rp 700 Triliun. Dana tersebut bersumber dari dividen BUMN tahun 2025 dan dana hasil efisiensi APBN. Padahal APBN 2025 dalam kondisi defisit sebesar Rp 616,2 triliun. Tentu penempatan APBN untuk Danantara langkah yang terlalu berani.

Sebelum ada Danantara, dividen BUMN dialokasikan untuk tambahan kas negara, sehingga bermanfaat bagi pembangunan nasional. Posisi dividen BUMN saat itu sebagai uang segar bagi Negara. Dapat langsung digunakan oleh Negara. Namun hal itu tidak berlaku lagi setelah ada Danantara. Dividen BUMN akan masuk ke Danantara untuk kemudian diinvestasikan kembali. Sejatinya, dengan dialokasikannya dividen perusahaan-perusahaan BUMN kepada Danantara, ada potensi penerimaan negara akan bertambah atau akan berkurang.

Jika Danantara gagal mengelola dividen BUMN, maka negara akan sangat merugi. Sebab sumber dana awal saja sudah demikian fantastis. Belum lagi pengelolaan dividen untuk tahun berikutnya yang masih menyimpan risiko. Lagi-lagi masyarakat yang terkena imbasnya. Namun sebaliknya, jika Danantara berhasil maka tambahan kas Negara dapat berlipat ganda, sehingga tujuan Negara untuk memperoleh nilai tambah dari dividen bisa terwujud. Cukup disesalkan, investasi selalu

memiliki risiko. Investasi yang bersumber dari dividen BUMN tentu tidak mudah diprediksi tingkat keberhasilannya.

Sebenarnya, keberhasilan Danantara dalam mengelola dividen sangat bergantung pada tata kelolanya (*Good Corporate Governance*). Belajar dari Singapura, Temasek sebagai badan investasi sukses memberikan nilai tambah pada pendapatan negara. Fokusnya, Temasek dikelola orang-orang independen dan profesional. Strategi dan keputusan investasinya tidak bergantung pada intervensi pemerintah Singapura. Adanya pemisahan kepentingan



KR-JOKO SANTOSO

an politik dan keputusan bisnis menjadi pendorong berhasilnya badan investasi Temasek.

Parameter keberhasilan Temasek memberi tantangan sendiri bagi Indonesia. Sebab saat ini kemandirian Danantara dalam mengelola BUMN masih dipertanyakan. Semula pengelolaan BUMN hanyalah bersinggungan dengan Kementerian BUMN. Namun setelah adanya Danantara, pengelolaan BUMN menjadi lebih berlapis. Menurut UU Nomor 19 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 1 Tahun 2025, Danantara mengambil peran Kementerian BUMN untuk melakukan pengelolaan BUMN.

Tugas Danantara di antaranya mengelola dividen BUMN, menyetujui penambahan dan/ atau pengurangan penyertaan modal BUMN, bahkan memberikan/ me-

nerima pinjaman. Selain itu, Danantara bersama Menteri BUMN akan membentuk holding investasi dan holding operasional. Lebih rumit lagi, jika menilik ketentuan pada revisi ketiga UU BUMN tersebut, dividen BUMN akan dikelola oleh dua badan. Selain oleh Danantara, Dividen BUMN juga dikelola oleh holding investasi.

Sedang dividen holding investasi dan holding operasional dikelola oleh Danantara. Artinya, saat ini terdapat tiga lembaga baru yang kewenangannya saling bersinggungan dalam mengelola BUMN. Jika semula hubungan BUMN bersifat langsung kepada Kementerian BUMN, saat ini layernya bertambah. Karena itu, pengaturan mengenai holding investasi dan holding operasional sangat penting.

Sebenarnya, argumentasi itu muncul untuk menghindari terjadinya benturan kewenangan antara tiga lembaga tersebut. Apalagi masing-masing badan diisi oleh pengawas dan pengurus yang juga mayoritas berasal dari sektor pemerintahan. Sehingga adanya tiga lembaga baru tersebut tentu saja berpotensi mengurangi performa BUMN. Hierarkis itu sendiri berpotensi memperpanjang birokrasi. Terlebih bila pergerakan-penggerak di dalam Danantara, holding investasi maupun holding operasional dipengaruhi kepentingan politik. Tentu akan menghambat inovasi dan fleksibilitas dari perusahaan-perusahaan BUMN.

Perlu ada pengawasan dan penguatan kualitas *Good Corporate Governance* dalam Danantara, holding investasi dan holding operasional.

Karena saat ini kesejahteraan rakyat dipertaruhkan pada keberhasilan super holding BUMN tersebut. Bila tidak ditangani dengan baik, dapat menjadi penghalang bagi ketiga lembaga ini untuk mencapai tujuannya. □-f

*) **Yolanda Simbolon**, Dosen Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opini@kr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas dan foto diri. Terimakasih.

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)
No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Komisaris Utama:** Imam Satriyadi, SH.

Komisaris: Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.

Direktur Utama: Drs. H.Mohammad Idham Samawi.

Direktur Keuangan: Yuriani Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.

Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.

Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSos.

Direktur Litbang, Pengawasan & Bisnis: Yoeke Indra Agung Laksana, SE

Direktur Umum: Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

Pemimpin Umum: Drs. H. Mohammad Idham Samawi. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Dr Drs H Octo Lumpito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro, MM,CHE. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grasis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Kepala TU Langganan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk "Kedaulatan Rakyat Minggu"... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan Raya Yogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. .

Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifulhah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang: Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP

Banyumas: Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

Kulonprogo: Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul: Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -

- Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

PTS 'Mati Suri'

Eko Wahyunto

dan adaptif dengan pendidikan modern.

Problem Finansial

Berkurangnya jumlah mahasiswa berdampak langsung pada finansial PTS. Denyut nadi PTS bergantung pada likuiditas keuangan yang bersumber dari uang kuliah. Jika jumlah mahasiswa terus menurun, pemasukan menurun, dampaknya roda organisasi kampus sulit bergerak. Data Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia - Aptisi, sejak tahun 2023, sekitar 30% dari PTS di Indonesia mengalami kesulitan keuangan serius.

Secara mendasar daya saing akademik menjadi faktor krusial dalam mempertahankan eksistensi PTS. Program studi yang harus relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Ini menjadi kunci keberlangsungan ekosistem PTS.

Peningkatan kualitas dosen melalui pelatihan dan sertifikasi internasional diharapkan mendongkrak reputasi akademik. Riset dan kolaborasi dengan industri ditujukan menciptakan optimalisasi performa lembaga, sehingga memiliki 'magnet' bagi calon mahasiswa. Pada gilirannya kampus mendapat suntikan dana riset, sementara industri punya pihikan tenaga-tenaga "fresh graduate" berkualitas.

Diperlukan pengembangan metode pembelajaran berbasis teknologi digital, *hybrid learning* atau "blended learning" membuka ruang fleksibilitas pembelajaran bagi mahasiswa, kelas karyawan.

Peran Yayasan

Sebagai stakeholder terpenting, Yayasan memegang peran sentral dalam menjaga 'nyawa' PTS agar tetap kokoh bertahan dalam pertaruhan keras bisnis pendidikan.

Yayasan penjamin'rantai pasok' sistem pendanaan kampus yang bersumber dari kerjasama hibah penelitian, donasi ikatan kerja dengan dunia industri, optimalisasi aset dan investasi serta pendapatan lain yang sah.

Dalam aspek akademik, Yayasan harus menjadi inovator sekaligus fasilitator peningkatan kualitas pendidikan bersama seluruh pemangku kepentingan, menciptakan iklim sehat bagi peningkatan daya saing akademik, merancang strategi pemasaran dan branding agar kampus tetap menarik bagi calon mahasiswa baru.



MUSIM Penerimaan Mahasiswa Baru - PMB tiba. Geliat persaingan antar Perguruan Tinggi Swasta - PTS mulai memanas. Ini ancaman serius bagi roda organisasi lembaga. Lihat saja, kampus-kampus yang dahulu bersinar kini redup akibat pakecil calon mahasiswa baru. Sebagian terancam gulung tikar. Diperparah kebijakan pemerintah yang salah, dinilai jadi "biang kerok" terpuruknya kondisi PTS, yakni pemberian *privileged* pada perguruan tinggi negeri, melalui pelepasan jalur rekrutmen mandiri.

Berdasar Peraturan Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri dari Permendikburistek No. 48 tahun 2022, kuota Seleksi Jalur Mandiri di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) boleh sampai 50 persen.

Wajah PTS

Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi - Kemendikbuisantek pada tahun 2025 jumlah mahasiswa di Indonesia mencapai 7.369.009 orang. Dari jumlah tersebut, 2.994.015 mahasiswa berstatus sebagai mahasiswa negeri, sedang 4.374.994 mahasiswa berstatus sebagai mahasiswa swasta. Tren ini akan berubah drastis setelah PTN meningkatkan daya tampungnya secara agresif melalui jalur mandiri, dua hingga tiga kali lipat dari jumlah biasanya. Akibatnya, calon mahasiswa yang sebelumnya mengandalkan kuliah di PTS bergeser memilih PTN.

Indonesia memiliki 4.397 perguruan tinggi, mayoritas atau sekitar 3.136 adalah PTS. Dengan sebaran geografis didominasi di Pulau Jawa, yakni 1.428 PTS, sementara jumlah PTN hanya 49. Ini menunjukkan bahwa PTS menjadi "back bone" atau tulang punggung pendidikan tinggi di Indonesia.

Selain ketatnya kompetisi, kualitas program studi menjadi persoalan. Dari 100 PTS dengan sekitar 740 program studi, hanya sekitar 131 yang berstatus unggul. Diaku, akreditasi acapkali menjadi batu sandungan karena standar yang ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT). Bahkan, informasi yang beredar, BAN PT mengidentifikasi ada 84 PTS terancam dicabut izinnya karena tidak memenuhi standar. Untuk mengatasi hal ini, PTS perlu berupaya meningkatkan kualitas akademik dan daya saing agresif

Cawe - Cawe Negara

Dalam situasi demikian, negara harus hadir. Melalui pemerintah dengan memberi Insentif baik dalam bentuk dana hibah maupun beasiswa. Selain itu perlu ada keberanian melakukan terobosan baru dengan mengangkat semua dosen PTS menjadi dosen ASN, dengan standar dan kualifikasi yang disetarakan dengan dosen ASN pada umumnya. Dengan cara ini, maka dosen-dosen berkualitas terdorong untuk turun membantu keberadaan PTS. Karena semua gaji dan tunjangan sudah diselesaikan oleh negara melalui pemerintah. Yayasan hanya mengatur kepemilikan aset dan pengembangan infrastruktur kampus dengan mendapatkan kontrol ketat dari pemerintah.

Ke depan perlu dibuat formula baru, untuk penyelenggaraan pendidikan tidak diserahkan pada Yayasan perseorangan atau keluarga melainkan ke yayasan dengan cakupan organisasi lebih luas dan besar. Lihat saja bagaimana Muhammadiyah dan Nahdlatul ulama berkompetisi dalam membangun lembaga pendidikan. Organisasi kemasyarakatan bereputasi seperti KNPI, HMI dan lain-lain perlu diberikan mandat untuk mengelola pendidikan.

Dengan jalan itu maka penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab negara sesuai pasal 31 UUD 1945, dan didukung sektor publik dan organisasi sosial kemasyarakatan dengan baik. □-f

*) **Dr Eko Wahyunto MM, Doktor Bidang Pendidikan dan Dosen STMM MMTK Yogyakarta.**

Pojok KR

DPR minta polisi tangkap preman berkedok ormas

-- Bagaimana dengan preman berdasar? ***

Civitas UMY minta Presiden tidak tandatangani UU TNI

-- Ditandatangani atau tidak, setelah 30 hari tetap sah sebagai UU ***

Pengunjung Candi Prambanan diprediksi naik 30%

-- Jangan lupa perbanyak ketersediaan tempat sampah

Berabe